

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kesejahteraan masyarakat adalah cita-cita luhur dari setiap bangsa. Kemerdekaan bukan saja bermakna kebebasan dari penjajah, lebih dari itu adalah tercapainya masyarakat yang adil, makmur dan terbebas dari belenggu kemiskinan. Artinya bebas dari belenggu kemiskinan, dimana Undang-Undang Dasar 1945 memberikan amanat konstitusional untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah di Indonesia, memberikan kontribusi untuk kesejahteraan umum dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ketimpangan ekonomi, atau ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah, dan tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, merupakan dua keprihatinan utama di banyak negara berkembang (Hermanita, 2013).

Kemiskinan adalah standar tingkat hidup yang rendah karena kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang bila dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku dimasyarakat sekitarnya. Kemiskinan adalah keadaan ketidakmampuan ekonomi yang ditandai dengan tingginya standar prioritas utama di daerah. Ini adalah keadaan ketidakmampuan untuk membuat keputusan untuk mengakui kebutuhan perumahan sebagaimana seharusnya. Pendapatan rendah tidak hanya mengakibatkan kurangnya kebutuhan dasar, tetapi juga ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata (Mudrajat, 2017).

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang ada di berbagai provinsi, kabupaten/kota di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya melalui implementasi berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk masyarakat miskin agar mandiri baik dalam bidang ekonomi, sosial dan aspek kehidupan lainnya, oleh karena itu diperlukan kebijakan yang terpadu dan sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah negara, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan rakyat miskin (Mahaeni et al., 2011).

Menurut (Jasasila, 2020), Kemiskinan dapat diukur dengan konsep kemampuan yang mana dapat memenuhi kebutuhan dasar. Konsep ini mengacu pada yang namanya *Handbook on Povetry and Inequality* yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Jika di tinjau dari segi pendekatan ini, maka kemiskinan sebagai kondisi yang menyatakan ketidakmampuan dari segi ekonomi yang berguna untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar yang berupa makanan yang dapat di ukur dari sisi penegeluaran.

Pembangunan berkelanjutan merupakan interaksi antar pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan secara berkelanjutan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan pada September 2015. SDGs merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs) yang memiliki 17 tujuan yang saling berkaitan dengan tujuan “*to leave no one behind*” pada tahun 2030.

Salah satu bukti pemerintah Indonesia dalam menunjukkan keseriusannya pada SDGs adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH). PKH sebagai bantuan tunai bersyarat (*conditional cash transfer*) berupaya merubah sikap dan perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berkaitan dengan komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sehingga menjadi sejahtera dan mandiri. KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, gizi, pangan, pendidikan, perumahan, dan program perlindungan sosial dasar lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Bantuan-bantuan sosial tersebut terintegrasi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian keluarga.

Program pengentasan kemiskinan saat ini masih terus gencar dilakukan, berbagai macam program pemberdayaan dilaksanakan, hal ini meningkatkan perekonomian masyarakat kearah yang lebih baik lagi. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan kondisi masyarakat yang masih dikatakan miskin yang terbilang cukup tinggi, belum lagi ada yang dinamakan rentan miskin. Pada tahun 2016 penduduk miskin mencapai 28,01% juta orang (10,86%). Jika kita amati penduduk miskin sangatlah banyak dan perlu adanya program pemberdayaan yang efektif serta mempunyai nilai berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga dengan program yang akan dilaksanakan mempunyai pengaruh bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Upaya pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan dalam bentuk kebijakan dan program, baik secara langsung maupun tidak langsung. Politik keistimewaan

dilakukan melalui penggunaan program perangkat lunak, seperti yang diberikan secara cuma-cuma yaitu Raskin, Jamkesmas, IDT, dan Bantuan Langsung tunai (BLT). Meski berbagai upaya telah dilakukan, namun tidak mungkin menghilangkan kemiskinan secara tuntas, yang berarti fenomena kemiskinan dapat dengan mudah dideteksi hampir di semua wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan.

Misi program yang sedang dilaksanakan baik dari sumber pemerintah maupun non pemerintah biasanya bersifat sementara, artinya program akan berjalan selama ada anggaran (dana), setelah dana habis maka kegiatan program juga akan selesai. Dengan kata lain, program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan selama ini lebih didasarkan pada pendekatan proyek daripada pendekatan program. Tidak mengherankan jika program pengentasan kemiskinan tidak berkelanjutan, sehingga angka kemiskinan *absolut* di Indonesia tetap tinggi.

Pemerintah dalam upaya menurunkan tingginya angka kemiskinan yaitu dengan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, melalui program pengentasan kemiskinan seperti diberlakukannya program berbasis perlindungan sosial (JAMKESMAS, RASKIN, BSM, PKH) mulai diperkenalkan pada tahun 2007 dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, program berbasis pemberdayaan masyarakat (PNPM), pemberdayaan usaha mikro (KUR), program-program ini berdasarkan pasal 11 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menentukan bahwa: “perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial”.

PKH sebagai salah satu program prioritas Nasional telah berfungsi sebagai poros (*epicentrum*) penanggulangan kemiskinan yang mengintegrasikan berbagai program perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, yang tersebar di berbagai Kementerian dan Lembaga Negara. Meski kini tingkat kemiskinan sudah di angka satu digit, pemerintah masih punya tugas besar mengeluarkan masyarakat dari bawah garis kemiskinan. Kebijakan yang dapat mendukung pengentasan kemiskinan dan kemandirian penerima manfaat pun terus dilakukan. Salah satu strategi prioritas penanggulangan kemiskinan yang akan datang adalah melalui pendekatan *life cycle* yaitu perlindungan sosial sepanjang hayat.

Sasaran penerima manfaat PKH adalah keluarga miskin (yaitu orang tua-bapak, ibu dan anak), salah satu orang tua bertanggung jawab atas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Oleh karena itu, keluarga sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus lingkaran setan kemiskinan yang diwariskan secara turun-temurun. Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga, yang mencerminkan satu unit pengeluaran konsumen (dilakukan dalam bentuk satu dapur). Bantuan tunai PKH diberikan kepada ibu atau wanita dewasa (nenek, tante, atau kakak perempuan), yang selanjutnya disebut pengurus keluarga. Pengecualian terhadap ketentuan di atas dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, misalnya jika dalam keluarga tidak ada perempuan dewasa, maka kepala keluarga dapat diganti.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh BPS dalam pendataan sosial ekonomi RTM dapat dikatakan layak jika telah memenuhi variabel-variabel yang

telah ditetapkan oleh BPS. Adapun 14 variabel yang harus dipenuhi jika masyarakat tersebut dapat dikatakan RTM. Pendataan tersebut dilakukan oleh RT setempat untuk di mewawancarai kepala RTM secara lebih rinci (Isdijoso, 2016).

Menurut Kemenkes RI calon peserta PKH yang layak mendapatkannya harus telah memenuhi katagori yang telah ditentukan oleh Kemensos. Data masyarakat miskin itu dapat ditentukan atau dilihat berdasarkan pendapatan rumah tangga miskin yang mana data tersebut kita peroleh dari BPS. Kemudian akan dilakukan penyeleksian sesuai dengan kriteria yang telah dibuat oleh Kemensos.

Bantuan PKH kepada masyarakat harus dikategorikan sangat sulit bagi masyarakat miskin, sulit untuk mengakses pendidikan dan kesehatan, yang biasanya membutuhkan biaya. Masyarakat menengah yang tergolong miskin hanya bekerja sebagai buruh tani yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Orang-orang di PKH ini, yang tergolong buruh, bergabung dengan organisasi sebagai anggota, dan merasakan bantuan dalam memenuhi kebutuhan peserta.

Jambi adalah salah satu provinsi yang melaksanakan PKH sejak tahun 2008 hingga pada tahun 2022 mengalami kenaikan penerimaan bantuan PKH yang berjumlah 98 ribu KPM. Yang tersebar di kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Kabupaten Batang Hari terdiri dari 8 kecamatan 14 kelurahan dan 110 Desa, pada awal pelaksanaan tahun 2008 hingga saat ini penerima manfaat PKH di kecamatan Batang Hari mengalami kenaikan pertahunnya, yang mana artinya RTM di Kabupaten Batang Hari mendapatkan perhatian dari pemerintahan sehingga adanya

uluran tangan pemerintahan dalam memberikan bantuan kepada RTM. berikut data penerima PKH di Kabupaten Batang Hari:

Tabel 1. 1 Penerima PKH di Kabupaten Batang Hari

No	Desa	Jumlah populasi KK	Persentase (%)
1	Bajubang	1.250	11,79
2	Batin XXIV	1.004	9,47
3	Mersam	831	7,83
4	Maro Sebo Ilir	530	5,00
5	Maro Sebo Ulu	2.061	19,44
6	Muara Tembesi	1.880	17,73
7	Muara Bulian	2.240	21,13
8	Pemayung	804	7,58
Jumlah		10.600	100,00

Sumber : Data Dinsos Kabupaten Batang Hari 2023

Berikut nama-nama desa/kelurahan di Kecamatan Maro Sebo Ulu beserta dengan jumlah penerima manfaat PKH :

Tabel 1. 2 Penerima PKH di Kecamatan Maro Sebo Ulu tahun 2023

No	Desa	Jumlah populasi KK	Persentase (%)
1	Batu Sawar	39	1,89
2	Bulu Kasab	139	6,74
3	Kampung Baru	152	7,37
4	Kembang Seri	115	5,57
5	Kembang Seri Baru	77	3,73
6	Mekar Sari	45	2,18
7	Olak Kemang	54	2,62
8	Padang Kelapo	75	3,63
9	Peninjauan	277	13,44
10	Rawa Mekar	39	1,89
11	Rengas IX	71	3,44
12	Simpang S Rengas	149	7,22
13	Sungai Lingkar	210	10,18
14	Sungai Ruan Ilir	197	9,55
15	Sungai Ruan Ulu	140	6,79
16	Tebing Tinggi	122	5,91
17	Teluk Leban	160	7,76
Jumlah		2.061	100

Sumber : Data Dinsos Kabupaten Batang Hari 2023

Di Kabupaten Batang Hari terdapat di Kecamatan Maro Sebo Ulu merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah terbanyak penerima manfaat sesuai dengan tabel 1.1 jika dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Batang Hari yang mana dapat dikatakan bahwa Kecamatan Maro Sebo Ulu berada di bawah garis kemiskinan.

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Batang Hari yang mana menurut data yang ada di BPS berjumlah 28.503 sedangkan penerima bantuan PKH di Kabupaten Batang Hari mencapai 10.600 yang termasuk kedalam program PKH jika di persentasekan yaitu 37% penerima PKH dari jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Batang Hari.

Dengan pemaparan inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, karena menurut hasil observasi peneliti, banyak masyarakat yang bangga menjadi penerima manfaat PKH. Maka judul penelitiannya **“Efektivitas dan Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka masalah yang akan di angkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas PKH terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari?

2. Bagaimana pengaruh PKH terhadap aspek pendidikan dan aspek kesehatan di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk dapat mengetahui Efektivitas PKH terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari
2. Untuk dapat mengetahui pengaruh PKH terhadap aspek pendidikan dan aspek kesehatan di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari

1.4 Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan mengenai konsep yang berkaitan dengan efektivitas dan pengaruh PKH terhadap pengentasan kemiskinan.

2. Kepentingan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan penting bagi pemerintahan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari untuk dapat meninjau dan mengkaji apakah dalam pengentasan kemiskinan dengan PKH yang di targetkan terealisasi dengan tepat.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan kepada pemerintahan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari untuk dapat mengambil kebijakan mengenai pengaruh dari PKH.